

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Garut merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Barat yang memiliki sejarah panjang dalam perkembangan sosial, budaya, dan ekonominya. Secara administratif, Kabupaten Garut berdiri sejak tahun 1813 setelah Letnan Gubernur Jenderal Raffles mengeluarkan keputusan pembentukan kembali Kabupaten Limbangan dengan pusat pemerintahan di Suci, meskipun Suci kemudian dianggap tidak layak sebagai ibu kota. Setelah dilakukan peninjauan lokasi baru oleh panitia yang dibentuk oleh Bupati Adipati Adiwijaya, nama ‘Garut’ dipilih sebagai ibu kota administratif baru. Nama Limbangan resmi diganti menjadi Kabupaten Garut pada tanggal 1 Juli 1913 berdasarkan *Staatsblad/Governor-General Decree* nomor 60 tanggal 7 Mei 1913.¹

Sejak saat itu, Kabupaten Garut berkembang menjadi salah satu wilayah penting di Priangan dengan potensi pertanian dan perkebunan, khususnya kopi, teh, serta sayuran. Kecamatan Garut sebagai ibu kota kabupaten juga menjadi pusat perdagangan dan pemerintahan, yang dari masa ke masa semakin ramai oleh kehadiran penduduk bumiputra maupun pendatang. Dalam tatanan sosial masyarakat Kabupaten Garut, kehadiran masyarakat pendatang ke Kabupaten Garut salah satunya adalah etnis Tionghoa mereka memiliki posisi signifikan dikarenakan pada awal tahun 1950-an komunitas Tionghoa dikenal sebagai kelompok pedagang yang relatif sejahtera dan menempati lapisan menengah yang cukup dinamis, dengan permukiman terpusat di kawasan *Pengkolan* yang menjadi kawasan pecinan Garut.²

Kondisi sosial-ekonomi masyarakat Garut pada awal 1960-an diwarnai ketimpangan antara penduduk bumiputra dan etnis Tionghoa yang banyak bergerak

¹ Darmansyah, M. (2018). *Garut Era Kepemimpinan Bupati R.A.A Soeria Kertalegawa (1915-1929)*. *Jurnal Renaissance*, 3(2). hlm. 375.

² Sofianto, K., Nugrahanto, W., Yuniadi, A., & Falah, M. (2018). *Pembauran Etnis Cina dan Kaum Bumiputra di Kota Garut (Tinjauan Historis)*. *Patanjala: Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya*, 10(2). hlm. 182.

di sektor perdagangan, dimana terjadi ketimpangan kelas antar etnis Tionghoa dan bumiputra dimana etnis Tionghoa berada pada lapisan menengah dan bumiputra berada di lapisan bawah. Ketegangan ekonomi yang bercampur dengan isu politik kemudian memicu konflik sosial pada tahun 1963 tepatnya pada tanggal 17–18 Mei terjadi kerusuhan anti Tionghoa di Kabupaten Garut.³

Tidak hanya ketimpangan ekonomi faktor pemicu terjadinya Kerusuhan Anti Tionghoa di Kabupaten Garut pada 1963 adalah adanya isu politik dimana pada saat itu terjadi yaitu meningkatnya organisasi kepemudaan Islam hal ini juga dilatarbelakangi oleh berkembangnya ideologi lain selain Islam⁴. Semua organisasi tersebut menentang berkembangnya komunisme di Kabupaten Garut dimana komunisme pada saat itu identik dengan masyarakat Tionghoa. Keterkaitan ini muncul karena adanya anggapan di sebagian masyarakat bahwa etnis Tionghoa memiliki hubungan dengan komunisme, terutama karena dikaitkan dengan ideologi yang berkembang di negara asal leluhur mereka yaitu China.

Faktor-faktor lain turut mempengaruhi terjadinya Kerusuhan Anti Tionghoa yang terjadi di Jawa Barat pada tahun 1963 termasuk di Kabupaten Garut yaitu sentimen anti Tionghoa yang sudah mengakar sejak zaman kolonial Belanda dengan menciptakan pemisahan sosial, ekonomi, dan hukum antar kelompok etnis. Melalui berbagai kebijakan seperti stratifikasi ras, *wijkenstelsel*, *passenstelsel*, serta pemberian peran sebagai perantara ekonomi, etnis Tionghoa ditempatkan pada posisi menengah yang relatif lebih diuntungkan dibandingkan bumiputra. Kondisi ini menimbulkan kecemburuan sosial dan memperkuat prasangka, terlebih karena perlindungan hukum Barat lebih banyak diberikan kepada etnis Tionghoa dibandingkan masyarakat bumiputra.

Kesenjangan dalam posisi ekonomi serta minimnya pembauran sosial terus berlangsung, termasuk di wilayah seperti Garut. Pola permukiman yang cenderung terpisah, interaksi yang terbatas, serta perbedaan tingkat kesejahteraan turut memperlebar jarak antar kelompok. Kondisi tersebut kemudian mendorong muncul

³ Pangestu, Kumalasari, & Aman. (2021). *Anti-Chinese Incident in West Java in 1963*. Paramita: Historical Studies Journal, 31(2). hlm. 97.

⁴ Hidayat, A. A. (2015). *Kerusuhan anti Cina di Kota Garut tahun 1963*. Disertasi. Universitas Indonesia. hlm. 162.

dan berkembangnya stereotip negatif di kalangan masyarakat bumiputra, yang pada akhirnya semakin memperkuat sentimen dan prasangka terhadap etnis Tionghoa. Stereotip terbentuk melalui proses sosial yang berulang dan diwariskan dari waktu ke waktu, pandangan tersebut menjadi semakin mengakar.

Kerusuhan ini bermula dari meningkatnya ketegangan sosial antara masyarakat bumiputra dan etnis Tionghoa di Kecamatan Garut, khususnya di kawasan *Pengkolan* yang pada saat itu dikenal sebagai pusat aktivitas perdagangan sekaligus pemukiman utama warga Tionghoa. Ketegangan tersebut tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kesenjangan ekonomi, minimnya interaksi sosial yang bersifat membaur, serta berkembangnya prasangka dan stereotip negatif di tengah masyarakat. Dalam kondisi tersebut, situasi menjadi semakin rentan terhadap konflik, terutama ketika dipicu oleh isu-isu yang dapat membangkitkan emosi massa.

Dalam peristiwa tersebut, massa yang tersulut emosi mulai menyerang berbagai bangunan milik warga Tionghoa. Sejumlah toko, rumah, dan tempat usaha dirusak, dibakar, dan dijarah, yang menyebabkan kerugian material dalam jumlah besar. Aksi tersebut tidak hanya mencerminkan ledakan kemarahan sesaat, tetapi juga menunjukkan adanya akumulasi ketegangan sosial yang telah berlangsung sebelumnya. Selain itu, pemusatan sasaran pada aset ekonomi memperlihatkan bahwa konflik yang terjadi tidak hanya bernuansa etnis, tetapi juga berkaitan dengan persoalan ekonomi dan kecemburuan sosial yang telah lama berkembang di masyarakat.⁵

Pasca terjadinya peristiwa anti Tionghoa di Garut dampak yang ditimbulkan sangat signifikan termasuk dampak dari segi ekonomi. Pada saat itu ekonomi di Kabupaten Garut mengalami kemunduran karena roda penggerak ekonomi yaitu etnis Tionghoa memilih menutup diri ataupun tidak sedikit dari mereka yang meninggalkan Kabupaten Garut⁶. Tidak hanya dalam aspek ekonomi, peristiwa itu

⁵ Hidayat, A. A. (2024). *Resolution to Ethnic Conflict: Anti-Chinese Riots in Garut, Indonesia, in the middle of the Twentieth Century*. *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial*, 7(1). hlm. 69-70.

⁶ *Ibid.*,

juga sangat berdampak kepada etnis Tionghoa mereka mengalami trauma dan ketakutan yang sangat besar kepada kaum bumiputra.

Hilangnya golongan yang menjadi penggerak utama perdagangan lokal menyebabkan penurunan drastis pada aktivitas ekonomi, terutama di sektor distribusi barang, perdagangan hasil bumi, serta usaha kecil dan menengah. Hal ini mengakibatkan harga kebutuhan pokok melonjak, kawasan *Pengkolan* yang menjadi pusat kota dan juga pasar menjadi sepi. Selain itu, banyak buruh yang bekerja di pabrik-pabrik orang Tionghoa kehilangan pekerjaannya, dikarenakan banyak pabrik yang dirusak dan dijarah pada saat kejadian anti Tionghoa di Kabupaten Garut. Adanya perusakan yang cukup parah kepada sektor pabrik tidak hanya menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran, tetapi juga mengakibatkan berkurangnya kemampuan produksi daerah yang sebelumnya berperan penting sebagai penopang utama perekonomian lokal.

Ketergantungan ekonomi antara etnis Tionghoa dan masyarakat bumiputra memiliki sifat yang paradoksial. Dominasi ekonomi etnis Tionghoa di berbagai sektor strategis sering kali dipandang sebagai bentuk ketidakadilan, meskipun pada kenyataannya peran mereka sangat vital dalam menggerakkan roda perekonomian lokal⁷. Ini sejalan dengan kondisi perekonomian di Kabupaten Garut pasca terjadinya kerusuhan di mana hilangnya peran komunitas Tionghoa dalam aktivitas perdagangan dan industri lokal menyebabkan terhentinya sebagian besar kegiatan ekonomi di Kabupaten Garut.

Kerusuhan anti Tionghoa di Kabupaten Garut merupakan manifestasi dari berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain kesenjangan ekonomi yang mencolok antara etnis Tionghoa dan bumiputra, sentimen etnis yang diperparah oleh krisis ekonomi nasional.⁸ Pada periode tersebut, Indonesia mengalami inflasi, sehingga terjadi kelangkaan barang kebutuhan pokok, dan ketidakpastian ekonomi yang berdampak pada meningkatnya keresahan sosial di tengah masyarakat. Dalam situasi demikian, etnis Tionghoa yang secara ekonomi relatif lebih kuat sering kali

⁷ Chua, M. L. (2000). *The paradox of free-market democracy: Indonesia and the problems facing neoliberal reform*. New York, NY: Council on Foreign Relations. hlm. 5.

⁸ Hidayat, A. A. (2021). *Loc. cit.*

menjadi sasaran kemarahan dan frustrasi sebagian masyarakat bumiputra yang merasa terpinggirkan dalam bidang ekonomi.

Kerusuhan anti Tionghoa yang terjadi di Kabupaten Garut tahun 1963 tidak dapat dipahami sebagai peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari rangkaian kerusuhan yang juga terjadi di berbagai wilayah lain di Jawa Barat pada periode waktu yang hampir bersamaan. Beberapa wilayah yang mengalami kejadian serupa antara lain Cirebon, Bandung, Sukabumi, Bogor Tasikmalaya, Sumedang⁹. Kesamaan waktu terjadinya peristiwa tersebut menunjukkan adanya keterkaitan dinamika sosial yang melampaui batas wilayah administratif masing-masing kota. Hal ini mengindikasikan bahwa ketegangan sosial yang terjadi pada masa itu tidak hanya dipicu oleh persoalan lokal, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang berkembang secara lebih luas di tingkat regional maupun nasional.

Selain faktor-faktor tersebut, peristiwa kerusuhan juga tidak terlepas dari berkembangnya berbagai isu dan propaganda yang beredar di tengah masyarakat pada masa itu. Dalam situasi ekonomi yang sulit, isu-isu mengenai dominasi ekonomi etnis tertentu serta tuduhan adanya praktik perdagangan yang tidak adil sering kali memicu kecurigaan dan ketegangan antar kelompok masyarakat. Penyebaran informasi yang tidak selalu dapat diverifikasi kebenarannya turut memperkeruh situasi sosial sehingga memicu munculnya tindakan-tindakan kekerasan yang bersifat spontan maupun terorganisir. Dalam kondisi sosial yang penuh tekanan tersebut, kerusuhan dengan mudah dapat meluas dan melibatkan partisipasi massa dalam jumlah yang besar. Sentimen anti komunis yang meningkat seringkali disamakan dengan sentimen anti Tionghoa, karena komunis Tiongkok dianggap sebagai pendukung utama Partai Komunis Indonesia (PKI). Etnis Tionghoa dijadikan simbol ancaman eksternal yang memicu kerusuhan tidak hanya politik tapi juga ekonomi, dengan kerugian mencapai miliaran rupiah di wilayah Jawa Barat¹⁰

⁹ Pangestu, D. A., Kumalasari, D., & Aman, A. *Loc. cit.*

¹⁰ Suryadinata, L. (1978). *Pribumi Indonesians, The Chinese Minority and China: A Study of Perceptions and Policies*. Singapore: Heinemann Educational Books (Asia) Ltd. hlm. 112–115.

Penelitian terkait Kerusuhan Anti Tionghoa di Garut pada 1963 telah dilakukan oleh Hidayat¹¹, Pangestu, dkk.¹², Sofianto, dkk.¹³. Penelitian ini menyoroti kerusuhan anti Tionghoa di Garut serta hubungan sosial antara etnis Tionghoa dan masyarakat bumiputra. Penelitian Hidayat lebih memfokuskan pada kronologi kerusuhan, faktor penyebab, serta proses resolusi konflik sosial-politik, selanjutnya penelitian Pangestu dkk, membahas kerusuhan anti Tionghoa yang terjadi di wilayah Jawa Barat, selanjutnya penelitian Sofianto yang membahas pembauran etnis Tionghoa dan kaum bumiputra di Kecamatan Garut pada abad ke-19. Penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti tentang aspek historis dan sosial-budaya dari hubungan antara etnis Tionghoa dan masyarakat bumiputra serta dinamika konflik yang melatarbelakangi terjadinya kerusuhan, sedangkan kajian mengenai dampak ekonomi yang ditimbulkan akibat kejadian kerusuhan anti Tionghoa di Garut pada 1963 belum dianalisis secara mendalam.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menelusuri dampak ekonomi yang muncul pasca peristiwa, baik terhadap aktivitas perdagangan maupun perubahan struktur ekonomi lokal, sehingga memberikan perspektif yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara konflik sosial-politik dan dinamika ekonomi lokal. Setelah terjadinya kerusuhan anti Tionghoa di berbagai wilayah respon dari pemerintahan Orde Lama cenderung menekankan pemulihan keamanan sosial dan stabilitas politik tanpa fokus pada pemulihan ekonomi yang ditimbulkan akibat kerusuhan tersebut.

Batasan spasial dalam penelitian ini diarahkan pada kawasan *Pengkolan* yang terletak di sepanjang Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Garut Kota. Pemilihan wilayah ini didasarkan pada fakta bahwa kerusuhan anti Tionghoa tahun 1963 terjadi di area tersebut, yang pada masa itu merupakan salah satu pusat ekonomi dan perdagangan di Kabupaten Garut. Kawasan *Pengkolan* didominasi oleh berbagai toko, tempat usaha, serta aktivitas perdagangan yang sebagian besar dikelola oleh masyarakat Tionghoa. Kondisi ini menjadikan wilayah tersebut sebagai lokasi utama terjadinya

¹¹ Hidayat, A. A. (2015). *Loc. cit.*

¹² Pangestu, D. A., Kumalasari, D., & Aman, A. *Loc. cit.*

¹³ Sofianto, K., Nugrahanto, W., Yuniadi, A., & Falah, M. *Loc. cit.*

kerusuhan dan aksi perusakan terhadap sarana-sarana ekonomi. Daerah lain di Kabupaten Garut tidak mengalami dampak langsung dengan tingkat intensitas yang sama seperti di Pengkolan. Dengan demikian, pembatasan spasial ini dilakukan agar penelitian lebih terarah dalam menganalisis dinamika kerusuhan serta implikasinya terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di pusat perdagangan Kabupaten Garut pada periode tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang diambil oleh pada penelitian ini adalah “Dampak Kerusuhan Anti Tionghoa Terhadap Dinamika Perekonomian Kabupaten Garut Tahun 1963”. Adapun pertanyaan penelitian yang dihasilkan dari rumusan masalah tersebut adalah:

- 1) Bagaimana kondisi ekonomi di Kabupaten Garut sebelum terjadinya Kerusuhan Anti Tionghoa tahun 1963?
- 2) Bagaimana kronologi Kerusuhan Anti Tionghoa di Kabupaten Garut tahun 1963?
- 3) Bagaimana dampak ekonomi yang ditimbulkan pasca terjadinya Kerusuhan Anti Tionghoa di Kabupaten Garut tahun 1963?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, penelitian yang berjudul “Dampak Kerusuhan Anti Tionghoa Terhadap Dinamika Perekonomian Kabupaten Garut Pada 1963” ini bertujuan untuk mengetahui:

- 1) Kondisi ekonomi di Kabupaten Garut sebelum terjadinya Kerusuhan Anti Tionghoa tahun 1963.
- 2) Kronologi Kerusuhan Anti Tionghoa di Kabupaten Garut tahun 1963.
- 3) Dampak ekonomi yang ditimbulkan pasca terjadinya Kerusuhan Anti Tionghoa di Kabupaten Garut tahun 1963.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian yang berjudul “Dampak Kerusuhan Anti Tionghoa Terhadap Dinamika Perekonomian Kabupaten Garut Tahun 1963” adalah sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat menambah pemahaman mengenai dinamika hubungan antar etnis di Kabupaten Garut serta dampaknya terhadap perekonomian yang selama ini masih jarang diteliti secara mendalam.

2) Manfaat Praktis:

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pembaca dalam memahami sejarah Kerusuhan Anti Tionghoa di Kabupaten Garut serta dampak ekonomi yang ditimbulkan dari kejadian tersebut, serta diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran bagi pembaca untuk menghindari tindakan agresif terhadap etnis lain. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai bahan refleksi untuk memperkuat nilai toleransi, solidaritas sosial, dan kerukunan antar-etnis dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara itu, bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi referensi atau landasan awal dalam mengkaji hubungan antara konflik sosial dan dampak ekonomi di daerah lain.

1.5 Tinjauan Teoretis

1.5.1 Kajian Teoretis

1) Teori Konflik Sosial

Konflik sosial merupakan suatu proses pertentangan yang timbul ketika kelompok-kelompok dalam masyarakat memiliki kepentingan, nilai, maupun akses terhadap sumber daya yang tidak seimbang. Dalam perspektif sosiologi klasik, konflik dipandang sebagai gejala inheren dalam struktur sosial, khususnya ketika distribusi kekuasaan dan sumber daya tidak merata. Menurut Lewis A. Coser menyatakan bahwa konflik sosial muncul sebagai upaya berbagai kelompok untuk mempertahankan atau memperoleh posisi, status, serta sumber daya yang langka,

sehingga ketegangan di antara kelompok tersebut dapat berkembang menjadi pertentangan terbuka.¹⁴

Konflik tidak hanya dipicu oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh perbedaan identitas, ideologi, dan kepentingan politik yang tumpang tindih. tetapi juga oleh perbedaan identitas, ideologi, dan kepentingan politik yang tumpang tindih. Ketika kelompok dalam masyarakat merasa posisinya terancam, baik secara sosial maupun ekonomi, maka muncul kecenderungan untuk mempertahankan kepentingan kelompoknya melalui tindakan-tindakan yang dapat memicu ketegangan dengan kelompok lain.

Dalam kondisi seperti ini, konflik menjadi semakin sulit dihindari karena setiap kelompok berusaha memperkuat solidaritas internal sekaligus mempertegas batas-batas sosialnya dengan pihak lain. Ketimpangan struktural yang tidak terselesaikan akan memperbesar jurang antar kelompok, sehingga potensi pertentangan semakin meningkat. Oleh sebab itu, konflik sosial dapat dipahami sebagai hasil dari proses akumulasi ketegangan yang berlangsung dalam masyarakat, di mana perbedaan-perbedaan yang sebelumnya bersifat laten dapat berubah menjadi konflik terbuka ketika dipicu oleh situasi tertentu atau tekanan eksternal.

Dalam perspektif konflik sosial, ketegangan yang terjadi di tengah masyarakat tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari proses panjang yang dipengaruhi oleh ketimpangan serta hubungan antarkelompok yang tidak seimbang.¹⁵ Perbedaan dalam akses terhadap sumber daya ekonomi, kesempatan kerja, maupun pengaruh sosial dapat memunculkan rasa ketidakadilan di kalangan kelompok tertentu. Ketika kondisi ini berlangsung secara terus-menerus tanpa adanya mekanisme penyelesaian yang efektif, maka potensi konflik akan semakin menguat. Akumulasi ketegangan tersebut pada akhirnya dapat berkembang menjadi pertentangan terbuka yang melibatkan berbagai kelompok dalam masyarakat. Situasi ini menunjukkan bahwa konflik sosial memiliki akar yang kompleks dan tidak dapat dipisahkan dari struktur sosial yang melingkupinya.

¹⁴ Coser, L. A. (1956). *The Functions of Social Conflict*. New York: Free Press. hlm. 8.

¹⁵ Giddens, A., & Griffiths, S. (2006). *Sociology*. Polity. hlm. 112.

Oleh karena itu, konflik seringkali menjadi cerminan dari ketidakseimbangan yang terjadi dalam kehidupan sosial.

Konflik sosial juga sering diperkuat oleh adanya konstruksi sosial yang membentuk citra negatif terhadap kelompok lain.¹⁶ Stereotip, prasangka, dan diskriminasi menjadi faktor penting yang memperlebar jarak sosial antarkelompok, sehingga komunikasi dan interaksi yang sehat menjadi terhambat. Dalam kondisi seperti ini, perbedaan yang sebenarnya bersifat wajar dapat ditafsirkan sebagai ancaman terhadap kelompok tertentu. Akibatnya, muncul sikap saling curiga yang semakin memperkeruh hubungan sosial di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa konflik tidak hanya dipicu oleh faktor material, tetapi juga oleh persepsi dan cara pandang yang berkembang secara kolektif. Dengan demikian, dimensi psikologis dan kultural turut berperan dalam mempercepat eskalasi konflik sosial.

Konflik sosial juga berkaitan erat dengan upaya kelompok dalam mempertahankan identitas dan eksistensinya. Ketika suatu kelompok merasa terpinggirkan atau tidak memperoleh pengakuan yang layak, mereka cenderung memperkuat solidaritas internal sebagai bentuk perlindungan diri. Namun, penguatan solidaritas ini seringkali diikuti dengan meningkatnya sikap eksklusif terhadap kelompok lain. Hal tersebut menyebabkan batas-batas sosial menjadi semakin tegas dan sulit ditembus oleh interaksi yang inklusif. Akibatnya, hubungan antarkelompok menjadi kaku dan rentan terhadap gesekan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memperbesar potensi terjadinya konflik yang lebih luas.

Konflik sosial dapat berkembang menjadi kekerasan apabila tidak terdapat kontrol sosial maupun institusi yang mampu meredam ketegangan yang terjadi¹⁷. Lemahnya peran aparat, tidak efektifnya kebijakan pemerintah, serta situasi politik yang tidak stabil dapat mempercepat perubahan konflik laten menjadi konflik yang bersifat terbuka. Dalam situasi seperti ini, tindakan kolektif yang destruktif seringkali muncul sebagai bentuk pelampiasan ketidakpuasan masyarakat. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh kelompok yang terlibat langsung, tetapi

¹⁶ Soekanto, S. (2012). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Rajagrafindo Persada. hlm. 98.

¹⁷ *Ibid.*, hlm 102

juga memengaruhi stabilitas sosial secara keseluruhan. Oleh karena itu, keberadaan institusi yang kuat menjadi sangat penting dalam menjaga keseimbangan sosial.

Maka dari itu, konflik sosial tidak hanya dapat dipahami sebagai bentuk pertentangan semata, tetapi juga sebagai bagian dari dinamika masyarakat yang mencerminkan adanya ketimpangan dalam struktur sosial. Konflik dapat menjadi indikator adanya masalah yang belum terselesaikan dalam kehidupan sosial. Apabila tidak dikelola dengan baik, konflik berpotensi berkembang menjadi kekerasan yang merusak tatanan masyarakat. Sebaliknya, jika dikelola secara konstruktif, konflik justru dapat menjadi sarana untuk mendorong perubahan sosial ke arah yang lebih adil dan seimbang. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap konflik sosial menjadi penting dalam upaya menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis.

1.5.2 Kajian Pustaka

Beberapa sumber yang dapat dijadikan landasan pemikiran dalam melakukan penelitian ini adalah buku yang berjudul *The Indonesian Economy in the Nineteenth and Twentieth Centuries* oleh Anne Booth. Buku ini membahas perkembangan ekonomi Indonesia dari masa kolonial hingga era awal kemerdekaan, dengan penekanan pada faktor-faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Buku ini akan menjawab rumusan masalah poin satu karena menggambarkan keadaan ekonomi nasional Indonesia pada awal Orde Lama.

Buku kedua yaitu buku yang berjudul *Etnis Tionghoa di Indonesia* oleh Mely G. Tan tahun 2008. Buku ini menjelaskan bahwa bahwa etnis Tionghoa memiliki peran penting dalam perekonomian lokal maupun nasional. Mereka dominan dalam perdagangan, usaha kecil-menengah, dan sektor jasa. Keberadaan mereka ini sering menimbulkan ketegangan sosial dengan masyarakat bumiputra akibat stereotip atau persepsi ketidaksetaraan ekonomi, meskipun banyak komunitas Tionghoa berhasil beradaptasi dan membangun jaringan sosial untuk mendukung integrasi budaya. Buku ini juga menyoroti dampak konflik sosial terhadap komunitas Tionghoa. Buku ini akan menjawab rumusan masalah poin dua karena dalam buku ini membahas mengenai segala bentuk diskriminasi terhadap etnis Tionghoa di Indonesia.

Buku ketiga yaitu *Indonesian Chinese in Crisis* oleh Charles A Coppel tahun 1983. Buku ini membahas sejarah panjang etnis Tionghoa di Indonesia, terutama dalam konteks konflik dan kerusuhan yang mereka alami sepanjang abad ke-20. Coppel menekankan bagaimana ketegangan sosial, diskriminasi, dan kebijakan pemerintah terhadap Tionghoa sering kali memicu kekerasan, baik dalam bentuk kerusuhan lokal maupun nasional. Buku ini akan menjawab rumusan poin tiga karena dalam buku ini membahas mengenai segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Orde Lama periode tahun 1965 terkait kerusuhan Anti Tionghoa di Indonesia.

1.5.3 Penelitian yang Relevan

Studi penelitian yang berjudul *Resolution to Ethnic Conflict: Anti-Chinese Riots in Garut, Indonesia, in the Middle of the Twentieth Century* karya Asep Ahmad Hidayat pada tahun 2024 di UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Penelitian ini membahas penyebab dari kerusuhan anti Tionghoa di Kabupaten Garut yaitu akumulasi dari berbagai faktor historis, sosial, ekonomi, politik, dan kultural. Sejak masa revolusi fisik, hubungan antara komunitas Tionghoa dan bumiputra di Kabupaten Garut sudah diwarnai ketegangan. Persamaan dari kedua penelitian ini terletak pada fokus utama yaitu peristiwa kerusuhan anti Tionghoa yang terjadi di Kabupaten Garut pada pertengahan abad ke-20, khususnya tahun 1963. Keduanya sama-sama menyoroti faktor sosial, politik, dan ekonomi yang melatarbelakangi munculnya konflik etnis. Perbedaan utama terletak pada sudut pandang dan arah analisis. Studi Hidayat tahun 2024 lebih menekankan pada resolusi konflik etnis, artinya berfokus pada bagaimana kerusuhan anti-Tionghoa dapat diredakan, bagaimana hubungan antar kelompok sosial dipulihkan, Sementara penelitian yang peneliti ambil lebih menganalisis dampak ekonomi dalam jangka menengah yang muncul akibat kerusuhan, terutama pada periode 1963–1969. Relevansi penelitian ini terhadap topik yang saya ambil yaitu terletak pada kontribusinya dalam memberikan gambaran mengenai proses penyelesaian konflik etnis pasca-kerusuhan 1963.

Studi penelitian selanjutnya berjudul *Pembauran Etnis Cina Dan Kaum Bumiputra Di Kota Garut Pada Abad XX* karya Kunto Sofianto, Widyo Nugrahanto, Agusman Yuniadi dan Miftahul Falah pada tahun 2018 di Universitas Padjadjaran.

Penelitian ini membahas pembauran antara etnis Tionghoa dan kaum bumiputra di Kecamatan Garut Kota pada abad ke-20 berlangsung secara terbatas dan tidak sepenuhnya harmonis. Dalam penelitian ini juga menegaskan bahwa hambatan utama pembauran terletak pada warisan kolonial, sikap eksklusif yang dipengaruhi *Chinese Culturalism*, serta persepsi negatif masyarakat bumiputra, sehingga integrasi kultural yang sejati sulit tercapai.

Persamaan kedua penelitian terletak pada fokus kajian terhadap kehidupan masyarakat Tionghoa di Kabupaten Garut. Baik penelitian Sofianto dkk, maupun penelitian yang peneliti ambil sama-sama berupaya menggali dinamika hubungan antara etnis Tionghoa dan masyarakat lokal, khususnya terkait kontribusi mereka dalam kehidupan sosial maupun ekonomi daerah. Keduanya menempatkan Kabupaten Garut sebagai ruang lingkup penelitian, sehingga sama-sama memberi perhatian pada konteks sejarah lokal yang lebih spesifik. Perbedaannya tampak dari arah analisis dan sudut pandang. Studi penelitian Sofianto dkk. lebih menekankan pada pembauran dan integrasi sosial antara etnis Tionghoa dengan kaum bumiputra di Kabupaten Garut sepanjang abad ke-20. Sementara itu, penelitian yang peneliti ambil mengambil sudut yang berbeda, yakni mengkaji dampak kerusuhan anti Tionghoa pada 1963 dan pengaruhnya terhadap dinamika perekonomian Kabupaten Garut hingga 1969. Relevansi penelitian Sofianto dkk, bagi penelitian yang akan peneliti bawaan adalah memberikan latar sosial-historis mengenai bagaimana etnis Tionghoa hidup, berinteraksi, dan berperan dalam perekonomian Kabupaten Garut sebelum serta sesudah kerusuhan 1963.

Studi penelitian selanjutnya berjudul *Anti-Chinese Riots in West Java in 1963* karya Dimas Aldi Pangestu, Dyah Kumalasari, dan Aman. Penelitian ini membahas rangkaian kerusuhan anti Tionghoa yang terjadi di berbagai daerah di Jawa Barat antara Maret hingga Mei 1963, termasuk di Cirebon, Bandung, Tasikmalaya, Garut, Sukabumi, dan Cianjur. Pangestu dkk, menelusuri latar belakang politik, sosial, dan ekonomi yang memicu kerusuhan, seperti krisis ekonomi nasional, ketimpangan sosial antara bumiputra dan warga Tionghoa, serta ketegangan politik akibat pembubaran partai PSI dan Masyumi. Penelitian Pangestu dkk, memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam hal objek kajian dan periode waktu. Keduanya sama-

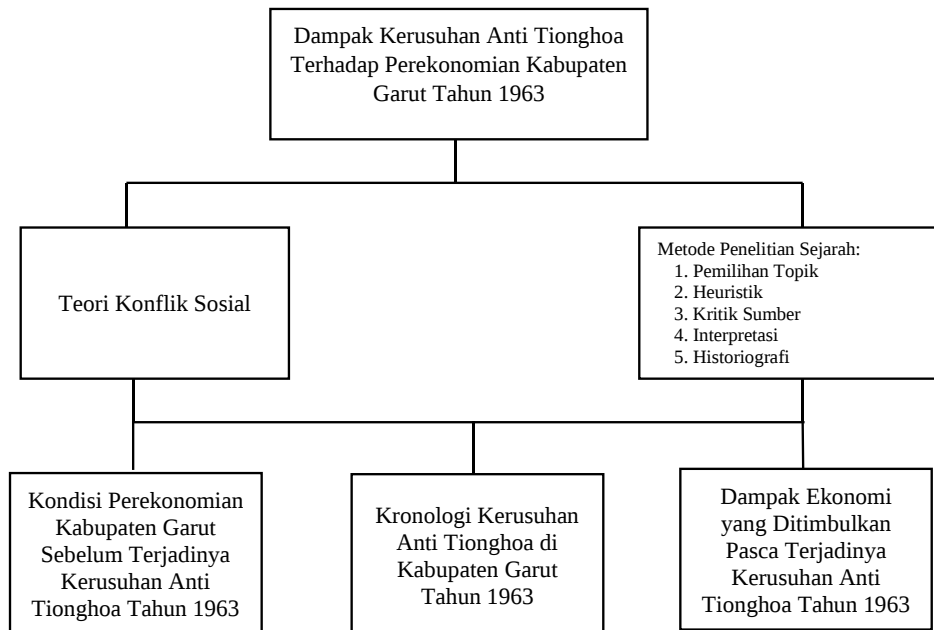
sama membahas peristiwa kerusuhan anti-Tionghoa tahun 1963 di Jawa Barat. Kemudian untuk perbedaan terletak pada fokus kajian dan ruang lingkup analisisnya.

Penelitian Pangestu dkk, membahas peristiwa anti-Tionghoa secara makro, mencakup seluruh Jawa Barat dan menekankan pada kronologi, latar belakang politik, serta reaksi pemerintah terhadap kerusuhan. Sementara itu, penelitian ini berfokus secara spesifik pada Kabupaten Garut, dengan fokus utama pada dampak ekonomi jangka menengah yang muncul setelah kerusuhan. Penelitian Pangestu dkk, memiliki relevansi yang kuat terhadap penelitian ini karena memberikan landasan historis dan konteks regional mengenai pola dan penyebaran kerusuhan anti-Tionghoa di Jawa Barat. Kajian tersebut menjadi rujukan penting untuk memahami posisi Garut dalam rangkaian peristiwa yang lebih luas, serta bagaimana faktor sosial-politik di tingkat provinsi turut memengaruhi kondisi lokal.

1.5.4 Kerangka Konseptual

Tema penulisan yang dikaji diawali dengan pembahasan mengenai kondisi ekonomi di Kabupaten Garut sebelum terjadinya kerusuhan anti Tionghoa pada tahun 1963, selanjutnya membahas mengenai kerusuhan anti Tionghoa di Kabupaten Garut, dan terakhir mengenai dampak kerusuhan terhadap perekonomian Kabupaten Garut pada periode tahun 1963. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori konflik sosial. Dengan menggunakan metode penelitian sejarah, penelitian ini dituangkan dalam judul “Dampak Kerusuhan Anti Tionghoa Terhadap Perekonomian Kabupaten Garut Pada 1963

Tabel 1.1 Kerangka Konseptual



1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Metode Penelitian

Proposal penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah karena membahas peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Menurut Kuntowijoyo, terdapat lima langkah yang perlu ditempuh dalam penelitian sejarah yaitu, menentukan topik, melakukan heuristik atau pengumpulan sumber, melakukan verifikasi atau kritik sumber, melakukan interpretasi, menyusun historiografi atau penulisan sejarah¹⁸. Berdasarkan pertimbangan yang dilakukan oleh peneliti, maka topik yang akan dibahas adalah Dampak Kerusuhan Anti Tionghoa Terhadap Dinamika Perekonomian Kabupaten Garut Pada 1963.

1) Pemilihan Topik

Pada tahap ini, peneliti telah melalui beberapa pertimbangan dengan menggunakan pendekatan emosional serta pendekatan intelektual agar dapat menentukan topik yang akan dikaji. Pendekatan emosional dilandasi oleh ketertarikan peneliti sebagai penduduk lokal Kabupaten Garut sementara

¹⁸ Kuntowijoyo. (2018). *Pengantar ilmu sejarah* (Edisi ke-1). Yogyakarta: Tiara Wacana. hlm. 70-82.

pendekatan intelektual berdasarkan ketertarikan peneliti atas topik yang akan diteliti. Berdasarkan pertimbangan yang telah peneliti lakukan, maka topik yang dipilih peneliti adalah dampak ekonomi yang ditimbulkan setelah terjadinya Kerusuhan Anti Tionghoa di Garut pada 1963 karena memiliki ketertarikan terhadap topik permasalahan aktivitas yang terjadi sekitar masa pemerintahan Orde Lama.

2) Heuristik

Heuristik merupakan tahap pengumpulan berbagai sumber, data, dan informasi, baik yang berbentuk tertulis maupun tidak tertulis, yang berkaitan dengan topik penelitian. Sumber sejarah sendiri adalah segala data yang dapat dimanfaatkan dalam kajian sejarah. Secara umum, sumber sejarah terbagi menjadi dua jenis, yaitu sumber primer dan sumber sekunder¹⁹. Sumber primer adalah sumber yang berasal langsung dari saksi atau pihak yang mengalami peristiwa tersebut, sedangkan sumber sekunder merupakan informasi yang disusun oleh peneliti yang memperoleh data dari orang lain dan tidak hidup pada masa terjadinya peristiwa.

Ada beberapa sumber yang relevan dan mendukung topik yang dipilih peneliti, yaitu sumber primer yang diperoleh dari Perpustakaan Nasional Indonesia, antara lain sebagai berikut:

- a. Surat kabar *Merdeka* dengan judul “*Team Indoktrinasi Harus Aktip Beri Penerangan*” pada 15 Mei 1963. Peneliti memperoleh sumber ini dari arsip koran Perpustakaan Nasional Indonesia.
- b. Surat kabar *Merdeka* dengan judul “*Katja-Katja Milik Tionghoa Hantjur*” pada 17 Mei 1963. Peneliti memperoleh sumber ini dari arsip koran Perpustakaan Nasional Indonesia.
- c. Surat kabar *Antara* dengan judul “*Teror Di Garut*” pada 18 Mei 1963. Peneliti memperoleh sumber ini dari arsip koran Perpustakaan Nasional Indonesia
- d. Surat kabar *Merdeka* dengan judul “*Golongan Tionghoa Supaja Menjelami Sedalam-dalamnja Djiwa Dan Tudjuan Revolusi Indonesia*” pada 18 Mei 1963.

¹⁹ *Ibid.*

Peneliti memperoleh sumber ini dari arsip koran Perpustakaan Nasional Indonesia.

- e. Surat kabar *Duta Masyarakat* dengan judul "Garut Rusak Djuga" yang diterbitkan pada 20 Mei 1963. Peneliti memperoleh sumber ini dari arsip koran Perpustakaan Nasional Indonesia.
- f. Surat kabar *Duta Masyarakat* dengan judul "*Hantjurkan Kaum Kontra Revolusioener Asing Jang Menjalankan Kekatjauan*" pada 21 Mei 1963. Peneliti memperoleh sumber ini dari arsip koran Perpustakaan Nasional Indonesia
- g. Surat Kabar *Duta Masyarakat* dengan judul "*Kita Harus Selamatkan Djiwa Tunas Muda dan Sendi-Sendi Kehidupan Ekonomi: Evaluasi Gubernur Djabar Tentang Peristiwa di Tasik dan Garut*" yang diterbitkan pada 21 Mei 1963. Peneliti memperoleh sumber ini dari arsip koran Perpustakaan Nasional Indonesia.
- h. Surat kabar *Merdeka* dengan judul "*Garut Djadi Sulit Makanan dan Pengangkutan*" pada 25 Mei 1963. Peneliti memperoleh sumber ini dari arsip koran Perpustakaan Nasional Indonesia.
- i. Surat kabar *Pikiran Rakyat* dengan judul "Bupati Kepda Garut Menjerukan: Hati2 Djangan Kena Provokasi Djangan Menarik Keuntungan" pada 28 Mei 1963. Peneliti memperoleh sumber ini dari arsip koran Perpustakaan Nasional Indonesia.
- j. Surat kabar *Pikiran Rakyat* dengan judul "*Dari Sidang DPRD-GR DT II Garut: Peristiwa 17 Mei di Garut Menampar Muka Sendiri?*" pada 1 Juni 1963. Peneliti memperoleh sumber ini dari arsip koran Perpustakaan Nasional Indonesia.
- k. Surat kabar *Pikiran Rakyat* dengan judul "*Sudah Ada Sejak 1895: Kelompok Etnis Cina di Kota Garut*" pada 16 Mei 2000. Peneliti memperoleh sumber ini dari arsip koran Perpustakaan Nasional Indonesia.

Sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku yang memiliki relevansi dengan topik yang diteliti baik dari berbentuk fisik ataupun digital.

- a. Buku *Garoet Kota Intan* oleh Kunto Sofianto yang terbit pada tahun 2001. Buku tersebut menjelaskan membahas perkembangan sejarah Kabupaten Garut dari

masa kolonial hingga masa setelah kemerdekaan. Dalam buku tersebut membahas berbagai dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi di wilayah Garut, termasuk perkembangan kawasan perdagangan serta kehidupan masyarakat yang beragam secara etnis dan budaya

- b. Buku *Anti Cina, Kapitalisme Cina dan Gerakan Cina* oleh Ong Hok Ham yang terbit pada tahun 2008. Dalam buku tersebut membahas berbagai dinamika dan persoalan yang berkaitan dengan posisi masyarakat Tionghoa dalam kehidupan sosial dan ekonomi di Indonesia
- c. Buku *The Indonesian Economy in the Nineteenth and Twentieth Centuries* oleh Anne Booth. Buku tersebut berisi gambaran tentang perkembangan ekonomi Indonesia dari abad ke-19 hingga abad ke-20, termasuk dinamika perdagangan, sektor pertanian, dan peran kelompok etnis tertentu dalam perekonomian nasional.
- d. Buku *Etnis Tionghoa di Indonesia* oleh Mely G. Tan yang terbit pada tahun 2008. Buku tersebut menjelaskan menjelaskan peran, kontribusi, dan posisi sosial-ekonomi etnis Tionghoa di Indonesia, serta tantangan yang mereka hadapi dalam sejarah dan perkembangan masyarakat Indonesia.
- e. Buku *Sukarno, Tionghoa, dan Indonesia Relasi, Jejak Sejarah, dan Pembangunan Bangsa* oleh Rudolfo. D. Ardi yang terbit pada tahun 2018. Buku tersebut membahas hubungan antara masyarakat Tionghoa dengan bangsa Indonesia dalam berbagai fase sejarah, khususnya pada masa pemerintahan Sukarno. Dalam buku tersebut dijelaskan bagaimana pandangan dan kebijakan Sukarno terhadap masyarakat Tionghoa yang ditempatkan sebagai bagian dari bangsa Indonesia serta pentingnya integrasi dalam proses pembangunan nasional.

3) Verifikasi (Kritik Sumber)

Verifikasi merupakan tahapan penting dalam penelitian sejarah yang bertujuan untuk menilai kelayakan serta keabsahan sumber-sumber yang telah diperoleh pada tahap heuristik. Melalui proses ini, peneliti dapat menentukan apakah sumber yang dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam penulisan sejarah atau tidak. Tahap verifikasi diperlukan agar penelitian tidak hanya bertumpu pada banyaknya sumber, tetapi juga pada kualitas dan kredibilitas sumber tersebut. Oleh karena itu, setiap sumber yang berhasil dihimpun perlu melalui proses penilaian

secara kritis agar informasi yang digunakan dalam penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dalam proses verifikasi, peneliti melakukan apa yang disebut sebagai kritik sumber. Kritik sumber merupakan langkah untuk menguji dan menilai tingkat kepercayaan suatu sumber sejarah sebelum digunakan dalam analisis lebih lanjut. Secara umum, kritik sumber terbagi menjadi dua jenis, yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Kedua bentuk kritik ini saling melengkapi dalam upaya memastikan bahwa sumber yang digunakan benar-benar autentik sekaligus memiliki isi yang dapat dipercaya. Kritik internal dilakukan untuk menilai kredibilitas isi dari suatu sumber sejarah.

Peneliti melakukan kritik eksternal dan internal terhadap salah satu sumber berupa surat kabar berjudul “Bupati Kepala Garut Menyerukan: Hati-hati Jangan Kena Provokasi, Jangan Menarik Keuntungan” yang diterbitkan oleh harian *Pikiran Rakyat* pada 28 Mei 1963. Dalam tahap kritik eksternal, peneliti menguji keaslian dokumen dengan cara menelusuri langsung ke Perpustakaan Nasional Indonesia. Meskipun sumber yang digunakan berbentuk digital, kondisi fisik surat kabar yang telah menguning menunjukkan bahwa dokumen tersebut merupakan arsip asli, bukan hasil reproduksi ulang atau fotokopi.

Selanjutnya, peneliti melakukan kritik internal dengan menganalisis isi dari surat kabar tersebut secara mendalam. Isi berita memuat sejumlah himbauan dari Bupati Garut pasca terjadinya insiden, yang menekankan pentingnya menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat. Selain itu, terdapat pula larangan bagi pedagang bumiputra untuk memanfaatkan situasi dengan mengambil keuntungan dari peristiwa anti Tionghoa yang terjadi di Kabupaten Garut. Surat kabar tersebut juga menguraikan berbagai langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam upaya mengendalikan dan menanggulangi dampak dari peristiwa tersebut.

4) Interpretasi

Interpretasi merupakan tahap penafsiran terhadap berbagai sumber yang telah lolos proses verifikasi. Dalam tahap ini terdapat dua bentuk kegiatan, yaitu

analisis dan sintesis.²⁰ Peneliti menjalankan keduanya dalam proses interpretasi. Analisis dilakukan dengan cara menguraikan sumber-sumber yang diperoleh, sementara sintesis dilakukan dengan menyatukan dan menghubungkan sumber-sumber tersebut agar membentuk pemahaman yang utuh. Melalui proses analisis dan sintesis tersebut, peneliti dapat menyusun gambaran sejarah yang komprehensif, menarik kesimpulan berdasarkan bukti yang ada, serta menafsirkan makna dan hubungan antarperistiwa sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam dan akurat mengenai topik yang diteliti.

Tahapan analisis dilakukan dengan kajian pustaka dari beberapa arsip surat kabar yang dapat ditafsirkan bahwa kerusuhan anti Tionghoa yang terjadi di Kabupaten Garut tahun 1963 tidak hanya menyebabkan kerugian pedagang Tionghoa serta bumiputra akan tetapi menjalar hingga meningkatnya angka pengangguran di Kabupaten Garut pada tahun 1963. Tahapan sintesis dilakukan dengan menafsirkan fakta dan ide dari proses analisis sebelumnya yang bertujuan untuk memperoleh fakta yang relevan sehingga dapat disusun secara kronologis dalam laporan penelitian.

5) Historiografi

Historiografi adalah tahap terakhir dalam penelitian sejarah, yang dilakukan setelah melewati fase heuristik, kritik sumber, dan interpretasi. Dalam metode penelitian sejarah, penulisan sejarah merupakan langkah akhir dari beberapa fase yang kemudian akan dilakukan penulisan, pemaparan dan peloran hasil penelitian sejarah yang dilakukan. Penyajian tulisan sejarah terbagi menjadi tiga bagian, yaitu pengantar, hasil penelitian, dan simpulan. Tahap terakhir yang dilakukan penulis, setelah seluruh data terkumpul dan disusun sesuai sistematika, adalah menyajikannya dalam bentuk karya ilmiah berupa proposal penelitian yang menggambarkan dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh kerusuhan anti Tionghoa di Garut pada tahun 1963.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 72.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi, yaitu pendekatan yang memadukan analisis peristiwa masa lalu dengan pemahaman terhadap struktur dan dinamika sosial masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah hubungan antara kerusuhan anti-Tionghoa di Garut tahun 1963 dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat pada masa itu. Melalui pendekatan ini, peristiwa kerusuhan tidak hanya dilihat sebagai peristiwa politik atau etnis semata, tetapi juga sebagai cerminan dari ketegangan sosial dan ekonomi yang terjadi di tengah masyarakat Garut menjelang pertengahan tahun 1960.

Pendekatan sosiologi digunakan untuk menelusuri bagaimana struktur sosial, hubungan antar kelompok etnis, serta kondisi ekonomi dapat mempengaruhi munculnya konflik dan dampaknya terhadap kehidupan perekonomian. Dalam penelitian ini, etnis Tionghoa yang memiliki peran penting dalam sektor perdagangan dan perekonomian di Kabupaten Garut menjadi kelompok yang rentan terhadap sentimen sosial dan politik yang berkembang. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengungkap mekanisme sosial yang menyebabkan ketegangan antarkelompok serta bagaimana kerusuhan tersebut mengubah pola interaksi sosial dan kegiatan ekonomi masyarakat Garut.

Melalui pendekatan sosiologis, penelitian ini berupaya menelaah dampak sosial ekonomi yang muncul setelah kerusuhan, seperti menurunnya kegiatan perdagangan, berkurangnya rasa saling percaya antar kelompok masyarakat, serta perubahan struktur ekonomi lokal. Analisis ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana kerusuhan anti Tionghoa pada 1963 tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga meninggalkan dampak sosial yang berkepanjangan terhadap kehidupan ekonomi masyarakat Garut hingga tahun 1965. Dengan demikian, pendekatan sosiologi membantu penelitian ini melihat keterkaitan erat antara dinamika sosial dan perubahan ekonomi yang terjadi akibat konflik etnis di Kabupaten Garut.

1.6.3. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan skripsi yang akan dilakukan penulis sesuai dengan Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Jurusan Pendidikan Sejarah adalah:

Bab 1 berisi latar belakang masalah yang menjelaskan tentang ketertarikan penulis terhadap masalah yang akan dikaji lebih lanjut. Selanjutnya terdapat perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat serta kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka konseptual, metode penelitian dan ditutup dengan sistematika pembahasan.

Bab 2 membahas mengenai kondisi perekonomian Kabupaten Garut sebelum terjadinya Kerusuhan Anti Tionghoa di Kabupaten Garut pada 1963, dengan sub bahasan kondisi geografis Kabupaten Garut dan kondisi sosial ekonomi Kabupaten Garut pada tahun 1960-an.

Bab 3 membahas mengenai kronologi terjadinya kerusuhan Anti Tionghoa di Kabupaten Garut pada 1963, dengan sub bahasan latar belakang terjadinya kerusuhan anti Tionghoa di Kabupaten Garut pada 1963, dan membahas kronologi kerusuhan anti Tionghoa di sekitar kawasan *Pengkolan* pada tanggal 17-18 Mei 1963.

Bab 4 akan membahas mengenai dampak ekonomi yang ditimbulkan dari adanya kerusuhan anti Tionghoa di Kabupaten Garut pada 1963, dengan sub bahasan respon pemerintah terhadap etnis Tionghoa setelah terjadinya kerusuhan, serta akan membahas dampak ekonomi dari kerusuhan tersebut kepada etnis Tionghoa dan juga kepada masyarakat bumiputra, kemudian akan menjelaskan juga upaya pemerintah dalam memulihkan ekonomi Kabupaten Garut setelah terjadinya kerusuhan.

Bab 5 adalah bab simpulan dan saran yang berisikan kesimpulan mengenai hasil penelitian dan saran.